

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia. GDP (produk domestik bruto, yaitu nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun) adalah kedua tertinggi di dunia, dan merk-merk Jepang seperti Toyota, Sony, Fujifilm, dan Panasonic terkenal di seluruh dunia. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang, tapi negara ini miskin akan sumber daya alam. Pola umum yang dijalankannya adalah sebagai berikut : perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi, yang dijual di dalam negeri atau diekspor.¹ Jepang bisa merupakan negara maju dari berbagai macam bidang baik itu dari bidang ekonomi, IPTEK, budaya, ataupun politik.

Pasca-Perang Dunia II, Jepang menggunakan bentuk diplomasi ekonomi yang diformulasikan oleh PM Shigeru Yoshida yang secara resmi di jalankan sejak tahun 1957. Pada saat itu proses kembali masuknya Jepang ke Asia Tenggara menitikberatkan pada aspek perekonomian yang meliputi pembayaran rampasan perang dan juga kebutuhan Jepang akan raw materials dari negara-negara Asia Tenggara. Ekspansi ekonomi dan perdagangannya di awal tahun 1970-an mengembalikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi besar dan ini membuat gejolak di dalam negara-negara di Asia Tenggara. Ketika PM Tanaka Kakue datang ke Indonesia,

¹ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, “*Explore Japan*” (http://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_15.html, diakses pada 22 Mei 2018).

Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina pada tahun 1974, ia menghadapi beberapa demonstrasi kemarahan dan tuduhan akan arogansi bisnis Jepang.²

Dari beberapa kunjungan PM Tanaka seperti Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina, Indonesia merupakan negara dengan gejolak penolakan terbesar di Indonesia ditandai dengan peristiwa demonstrasi besar-besaran untuk menolak kedatangan PM Tanaka untuk datang ke Indonesia atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka memicu demonstrasi mahasiswa karena dianggap sebagai penjajahan ulang Jepang terhadap Indonesia.³

Hubungan Jepang-ASEAN memasuki babak baru saat Perdana Menteri Takeo Fukuda mendeklarasikan *Fukuda Doctrine* pada tahun 1977. Kebijakan *Fukuda Doctrine* menurut Michael Yuhuda merupakan inisiatif pertama Jepang yang paling ambisius setelah berakhirnya Perang Dunia II. ASEAN tidak saja ditempatkan sebagai kawasan paling penting bagi Jepang, tetapi juga sebagai “lahan” strategis Jepang untuk memainkan peranannya sebagai pemimpin Asia.

Doktrin ini dirancang untuk menjadi dasar bahwa kebijakan Jepang lebih diarahkan ke Asia Tenggara dan mendorong agar

² Adiasri Putri Purbantina, “*Dari Yoshida Doctrine ke Fukuda Doctrine: Politik Luar Negeri Jepang di Asia Tenggara Pasca-Perang Dunia II*”. *Global & Policy*, Vol.1 No.1, 2013, hal. 39.

³ Rahadian Rundjan, “*Malapetaka Politik Pertama*” (<https://historia.id/modern/articles/malapetaka-politik-pertama-PRbKP>, Diakses pada 03 November 2018).

Jepang memainkan peranan politik yang positif di wilayah ini. Sejak inilah, kemudian hubungan Jepang-Asia Tenggara dianggap memasuki fase baru.⁴ Dalam salah satu isi *Fukuda Doctrine*, juga terdapat poin "*heart-to-heart understanding*". Landasan Jepang mengeluarkan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa demonstrasi "*Anti Jepang*" saat kunjungan Perdana Menteri Kakuei Tanaka ke negara-negara ASEAN pada tahun 1974. Demonstrasi yang berujung pada kerusuhan ini merupakan bentuk penolakan masyarakat ASEAN atas dominasi perekonomian Jepang di negaranya. Para demonstran menilai Jepang menjajah ASEAN dalam bentuk baru melalui banyaknya aliran modal Jepang yang masuk ke negara-negara ASEAN. Jepang juga dinilai hanya ingin mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara ASEAN untuk kepentingan industrinya.

Esensi dari *Fukuda Doctrine* mencakup tiga hal yaitu Jepang tidak akan menjadi Negara adidaya militer. Kedua, Jepang akan menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan saling percaya terhadap negara-negara Asia Tenggara. Ketiga, Jepang akan bekerja sama secara positif dengan seluruh negara ASEAN sebagai mitra yang sejajar.⁵ Ketiga poin tersebut yang digunakan oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda untuk mengambil hati dan memperbaiki hubungan dengan ASEAN, kemudian Fukuda berusaha meyakinkan negara-negara ASEAN bahwa Jepang sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan militer seperti

⁴ Adiasri Putri Purbantina, *Op.Cit.*, hal. 40.

⁵ "Chapter Three: Diplomatic Efforts Made by Japan," *Diplomatic Bluebook for 1977: Review of Recent Developments in Japan's Foreign Relations* (Tokyo: MOFA, 1977), i.1.

sebelumnya. Fukuda juga menyatakan bahwa Jepang sudah siap untuk melakukan lebih banyak lagi beragam hubungan perdagangan dengan ASEAN dimana hubungan kerja sama yang terjalin harus dengan posisi yang lebih seimbang baik dari Jepang maupun ASEAN.⁶ Dengan adanya *Fukuda Doctrine* ini negara-negara ASEAN pun memutuskan untuk belajar lebih banyak dari Jepang mengingat kemunduran peran Amerika dari Asia Tenggara yang membuat ASEAN memerlukan pelindung baru terutama dalam bidang ekonomi.

Fukuda Doctrine ini juga langkah Jepang dalam menjalin kerja sama dengan ASEAN yang lebih komprehensif terlebih dahulu menjalin kerja sama melalui *Japan Forum on Synthetic Rubber* di tahun 1973. Dimulai dari tahun 1977 terbentuknya ASEAN-Japan Forum dan ASEAN Japan Center di tahun 1981 inilah titik awal kerja sama antara Jepang dan ASEAN bertumbuh dan dari kerja sama antar individu menjadi kerja sama regional. Terdapat kunci dari kerja sama antara Jepang dan ASEAN yaitu adanya ODA (Official Development Aid) yang telah terjadi sejak awal kerja sama Jepang dengan masing masing negara ASEAN. ODA ini mengikat ASEAN untuk terus melihat Jepang sebagai partner sedangkan di pihak ASEAN, ODA merupakan investasi tetap yang memungkinkan bertambah jumlahnya tahun ke tahun.⁷

⁶ Purnendra Jain, “*Koizumi's ASEAN doctrine*” (<http://www.atimes.com/japan-econ/DA10Dh01.html>, Diakses pada 03 November 2018).

⁷Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, “*Bertindak Bersama dan Maju Bersama Japan – ASEAN*” (http://www.id.emb-japan.go.jp/aj304_02.html, Diakses pada 22 Mei 2018).

Pasca berjalannya *Fukuda Doctrine* ini, Jepang sangat gencat melakukan kerja sama dengan ASEAN. Terbukti dari kerja sama yang dilakukan antara Jepang dengan ASEAN menghasilkan banyak kerja sama antara lain, didirikan ASEAN-Japan Centre (AJC), ASEAN-Japan Commemorative Summit, Treaty of Amity and Cooperation (TAC), Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youths (JENESYS), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Jepang juga merupakan penggagas studi mengenai Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) untuk menjajaki kemungkinan kerangka kerja sama bagi integrasi ekonomi diantara Negara anggota EAS dan melakukan pengujian terhadap dampak ekonomi CEPEA terhadap Negara-negara EAS.⁸

Berkat adanya Doktrin Fukuda memberikan dampak positif terhadap kebijakan luar negeri Jepang terhadap kerja sama Jepang dengan ASEAN, terbukti dari segala macam bentuk kontribusi Jepang terhadap ASEAN bisa dibilang berhasil dalam mengembalikan citra Jepang terhadap masa kelam yang terjadi pada negara-negara di Asia Tenggara pada perang dunia kedua yang sudah terjadi. Dan Jepang juga menaruh harapan yang sangat besar bagi ASEAN dalam menjalin kerja sama regional tersebut. Kontribusi dan kemitraan Jepang dengan ASEAN tak lepas dari upaya mantan Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda dengan *Fukuda Doctrine* yang hingga sekarang

⁸ Kementerian Luar Negeri, “*PTRI ASEAN-Jepang*” (<https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/Jepang.aspx>, Diakses pada 22 Mei 2018).

menjadi pedoman atau komitmen Jepang melakukan kerja sama dengan ASEAN.⁹

Dilihat dari awal mula *Fukuda Doctrine* yang diciptakan pada saat Perang Dingin masih berlangsung yang dimana pada saat itu konflik masih berkejolak diantara dua negara adikuasa (*bipolar*) yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika yang pada saat itu menggunakan Jepang yang pada saat itu sebagai *Buffer Zone* guna untuk mencegah komunisme masuk di wilayah Asia. Dan Jepang pada waktu itu masih fokus dalam memperbaiki hubungan dengan Asia Tenggara melalui *Fukuda Doctrine* yang dimilikinya karena Jepang pada saat Perang Dingin tidak ingin menggunakan kekuatan militer untuk melakukan pendekatan karena Jepang lebih menekankan pendekatan yang lebih *Soft* ketimbang menggunakan pendekatan militer yang sangat sensitif pada saat itu.¹⁰

Hingga Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 atau pasca Perang Dingin dan dunia sudah tidak lagi *bipolar* melainkan sudah *multipolar* Jepang masih gencar melakukan kerja sama di ASEAN menggunakan *Fukuda Doctrine* hingga menghasilkan berbagai macam kerja sama. Pada tahun 2017 ASEAN menyelenggarakan 40 tahun berdirinya *Fukuda Doctrine*,

⁹ Bhubhindar Singh. "Japan-ASEAN Relations: Challenges, Impact and Strategic Options." *Panorama: Insights into Asian and European Affairs*, no. 1. 2017, hal. 95.

¹⁰ David E. Sanger. "After the Cold War Views From Japan; Tokyo in the New Epoch: Heady Future, With Fear" (<https://www.nytimes.com/1992/05/05/world/after-cold-war-views-japan-tokyo-new-epoch-heady-future-with-fear.html>, Diakses pada 8 November 2018).

doktrin ini telah menjadi simbol persahabatan dan kerjasama antara Jepang dan Asia Tenggara hingga masa sekarang ini.¹¹

Sehingga dari latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti “*Mengapa Jepang masih merujuk pada Fukuda Doctrine dalam hubungan dengan ASEAN, meskipun politik internasional telah banyak perubahan ?*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini yaitu:

Mengapa Jepang masih merujuk pada Fukuda Doctrine dalam hubungan dengan ASEAN, meskipun politik internasional telah banyak berubah ?

C. Kerangka Teori

Untuk membantu menjelaskan menjelaskan permasalahan yang ada,penulis akan menggunakan teori Regionalisme dan konsep ‘Angsa-Terbang’(*flying-geese*).

1. Teori Regionalisme

Sejarah munculnya regionalisme ditandai oleh dua faktor, yaitu pertama, dengan melihat faktor daya ikat (kohesi) yang membuat negara-negara tertarik untuk melakukan kerjasama

¹¹ Kei Koga, (n/a). *Transcending the Fukuda Doctrinel*. Washington, DC : Center For Strategic and International Studies, Japan Chair.

regional. Kedua, dengan melihat lahirnya sebuah institusi regional sebagai wujud dari kerjasama regional di suatu kawasan tertentu. Kedua faktor ini bersifat berkesinambungan. Kohesi atau daya ikatlah yang menjadi faktor penentu terwujudnya kerjasama yang memuncak pada pembentukan institusi regional dan juga menentukan apakah institusi regional tersebut dapat bertahan atau tidak.¹²

Dilihat dari perodesasinya, regionalisme terbagi menjadi Regionalisme Klasik (*Old Regionalism*) dan Regionalisme Baru (*New Regionalism*). Regionalisme Klasik merupakan regionalisme yang muncul sekitar tahun 1960-an seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II (PD II) dan akan dimulainya Perang Dingin (*Cold War*). Ciri utama dari Regionalisme Klasik ialah lebih kepada bersifat *high politics*, seperti pembentukan aliansi keamanan. Kemudian Regionalisme Baru (*new regionalism*) muncul setelah terjadinya Perang Dingin yang dimana negara-negara di dunia tidak lagi menginginkan kerja sama yang bersifat *high politics*. Negara-negara tersebut lebih menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, mereka mulai melakukan kerjasama yang mengarah pada faktor ekonomi (*low politics*). Fawcett berpendapat bahwa ada empat faktor yang mendorong tumbuhnya Regionalisme Baru, yakni: (1) berakhirnya Perang Dingin, (2) Perubahan ekonomi dunia, (3) Hilangnya anggapan tentang negara “Dunia Ketiga”, (4) Demokratisasi.¹³

Sesuai dengan teori Regionalisme Baru yang dimana negara-negara tidak lagi menginginkan kerja sama yang bersifat *high politics* seperti kerja sama dalam membuat aliansi

¹² Nuraeni S., dkk., 2010, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasiona*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 16.

¹³ *Ibid.* hal. 18-20.

keamanan, melainkan lebih yang dimana Jepang setelah kekalahannya dalam perang dunia kedua, dalam meningkatkan perekonomiannya bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN melakukan kerja sama dibidang ekonomi, karena negara-negara anggota ASEAN masih sangat menguntungkan bagi Jepang karena ASEAN merupakan salah satu mitra dagang mereka yang paling utama saat ini. Sehingga dalam hal ini ASEAN merupakan aset yang sangat berharga bagi Jepang.

2. Konsep ‘Angsa-Terbang’(*flying-geese*)

Terdapat dua versi konsep ‘angsa-terbang’ (*flying-geese*) yaitu, konsep ‘angsa-terbang’ versi lama dan versi baru. Konsep ‘angsa-terbang’ versi lama yang di kemukakan oleh Akamatsu, menggambarkan tentang perkembangan sebuah negara dengan mengacu kepada proses perkembangan dan tingkat industrialisasinya. Ia menyatakan secara sederhana bahwa negara-negara di Asia akan melewati empat tahap perkembangan ekonomi.

Gambar 1. 1 *Flying-Geese Model*



Sumber: google.com

Konsep ‘angsa-terbang’ versi baru menurut mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Saburo Okita mengemukakan bahwa yang menjadi focus penjelasannya ialah perkembangan ekonomi dari berbagai macam negara, yang biasanya terletak dalam satu wilayah yang sama dan sudah tidak lagi membahas tentang perkembangan industri-industri (per sektor) di suatu negara. Tingkat perkembangan ekonomi yang ada dilihat dari tingkatan industrialisasi masing-masing negara, yang tercermin melalui kemampuan negara tersebut dalam memproduksi komoditas industri yang ada. Semakin tinggi kemampuan Negara dalam memproduksi barang industri yang ada, maka semakin tinggi pula posisinya dalam model ‘angsa-terbang’. Negara yang memiliki tingkatan industrialisasi paling tinggi diposisikan sebagai ‘pemimpin’ dalam kawan ‘angsa-terbang’, dan diikuti oleh negara-negara lainnya yang memiliki kemampuan dibawahnya. Negara yang paling rendah kemampuannya ditempatkan pada barisan terbelakang dari kawan tersebut.¹⁴

Pada pertengahan 1980-an Saburo Okita berpendapat bahwa Jepang seharusnya menjadi pemimpin formasi ‘angsa-terbang’ dalam perkembangan ekonomi di wilayah Asia Pasifik yang dimana mengacu kepada Asia Timur dan Tenggara, dengan cara menyediakan modal yang cukup, teknologi, serta akses pasar bagi para pengikutnya. Dalam pidatonya di Kuala Lumpur ia juga menyebutkan bahwa peranan Jepang di kawasan Asia Pasifik bertujuan untuk pembangunan ekonomi,

¹⁴ Satoru Kumagai , (2008). *A Journey Through the Secret History of the Flying Geese Model*. Chiba, Japan : Developing Economies, JETRO.

dengan cara mengkombinasikan tiga elemen yakni ODA (*Official Development Assistance*), investasi, dan perdagangan.¹⁵ Seperti yang terdapat pada gambar diatas Jepang digambarkan dalam suatu formasi angsa-terbang (*flying-geese*), dimana Jepang berada pada posisi terdepan yang memimpin perekonomian Asia yakni melalui pemberian modal, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimana dalam hal ini Jepang merupakan penyumbang dana FDI terbesar di ASEAN.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik sebuah hipotesa :

1. Jepang masih menerapkan *Fukuda Doctrine* karena Jepang masih menganggap ASEAN menguntungkan bagi Jepang.
2. *Fukuda Doctrine* memberikan peluang Jepang menjadi pemimpin ekonomi ASEAN.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Fokus utama dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Fukuda Doctrine* di era kepemimpinan perdana menteri Shinzo Abe dalam menjalin kerja sama dengan ASEAN tahun 2012-2017.

¹⁵ *Ibid.*

F. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa, dan disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti. memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

G. Tujuan Penulisan

1. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui mengapa Jepang masih merujuk pada *Fukuda Doctrine* dalam hubungan dengan ASEAN, meskipun politik internasional telah banyak berubah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi kepustakaan agar dapat dimanfaatkan mahasiswa yang sedang menempuh studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional baik yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun di kampus lainnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis akan membagi ke dalam beberapa bab di mana di antara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi.

- a) Bab I, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
- b) Bab II, membahas tentang dinamika hubungan Jepang dan Asia Tenggara, dan *Fukuda Doctrine* sebagai arah kebijakan Jepang di ASEAN
- c) Bab III, membahas tentang perubahan politik internasional dan latar belakang dipertahankannya *Fukuda Doctrine* dalam relasi Jepang-Asia Tenggara.
- d) Bab IV, merupakan kesimpulan dari seluruh isi materi penelitian ini sekaligus merupakan rangkuman dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.